

**Laporan Hasil  
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi  
Tahun Anggaran 2012**



**ABSORPSI HUKUM ISLAM DALAM AKAD  
DI BANK SYARIAH**

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H  
Dr. A. Shomad, S.H. MH  
Ari Kurniawan, S.H. MKn

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga, sesuai dengan  
Surat Keputusan Rektor Tentang Kegiatan Riset Unggulan Perguruan Tinggi  
Tahun Anggaran Nomor: 2613/H3/KR/2012, Tanggal 9 Maret 2012

**Universitas Airlangga  
2012**

## ABSTRAK

Dalam bidang ekonomi syariah, absorpsi nampak kentara dalam beragam aspek. Hal ini dikarenakan saat aspek syariah diaplikasikan dalam perbankan telah terjadi perkembangan yang sangat dahsyat dalam praktek perbankan, yang tanpa rambu religius. Masalah perekonomian ini, jika ditilik dari kategorisasi hukum Islam (fiqh), adalah kategori muamalah. Fiqih muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Absorpsi hukum Islam banyak di aplikasikan dalam perbankan syariah, sehingga diperlukan pemahaman hukum Islam dalam penerapan akad di bank syariah. permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana penerapan absorpsi hukum Islam dalam akad di bank syariah, apakah kontrak baku dalam transaksi bank syariah dibenarkan dalam Islam, dan bagaimanakah penyelesaian sengketa di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Bukopin. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kontraktual (*Contractual Approach*). Fatwa yang merupakan potret absorpsi syariah dalam akad di bank syariah bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yakni bank syariah yang akan mengeluarkan suatu produk. Akad pada bank syariah yang dituangkan dalam kontrak baku tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang pada akad tersebut mengandung rukun dan syarat akad, tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah yaitu *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek haram dan tidak melanggar prinsip perjanjian syariah antara lain prinsip kebebasan berkontrak, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, keadilan, amanah, adapun penyelesaian sengketa pada bank syariah memiliki pilihan forum penyelesaian baik secara litigasi maupun non litigasi.

Kata kunci : Absorpsi, Hukum Islam, Akad, Bank Syariah

### ABSTRAC

In the field of Islamic economics, absorption appears obvious in many aspects. This is because when applied aspects of Islamic banking has been tremendous growth in banking practices, which no religious signs. The problem this economy, if judging from the categorization of Islamic law (fiqh), is a category muamalah. Fiqh muamalah is God rules intended to regulate human life in worldly affairs or matters relating to worldly affairs and social. Absorption many Islamic law applied in Islamic banking, requiring an understanding of Islamic law in the implementation of the contract in Islamic banks. issues to be examined is how the application of Islamic law in the contract absorption in Islamic banks, whether the standard contracts in Islamic banking transactions are justified in Islam, and how the settlement of disputes in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Bukopin. The approach used in this study is the approach to legislation (statute approach), conceptual approaches (conceptual approach) and the contractual approach (Contractual Approach). Fatwa is a portrait of absorption in the contract sharia in Islamic banks is impossible for a response or an answer to the question posed by the requester fatwa that Islamic banks would issue a product. Agreement on the Islamic banks as outlined in the standard contract does not conflict with Islamic principles during the contract contains a harmonious and contract terms, do not violate the prohibited according to Islamic elements which gharar, maysir, usury, unjust and unlawful object and does not violate the principle of agreement among other Islamic the principle of freedom of contract, honesty, good faith, equality, equity, justice, dispute resolution amanah. The Islamic banks have the option of either resolution forum litigation and non-litigation.

**Keywords:** Absorption, Islamic law, Contract, Islamic Banking